

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara kesejahteraan merupakan indikator pelaksanaan sistem demokrasi yang lebih baik. Demokrasi abad-20 mencirikan “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dimana pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan berperan aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Budiardjo, 2017). Dalam hal ini negara memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Demokrasi abad-20 bertujuan menciptakan *welfare state* yang dianut oleh semua negara yang demokratis. Berbeda dengan demokrasi abad ke-19 yang mencirikan negara hanya mempunyai tugas dan berperan sebagai “Negara Penjaga Malam” yakni bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau apabila keamanan umum terancam.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaannya sudah mencirikan negara demokrasi abad-20 dimana pemerintah bertanggungjawab terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Namun, pada tahun 2020 lembaga internasional bernama *Economies Intelligence Unit* (EIU) mencatat salah satu indikator penyebab lemahnya demokrasi di Indonesia adalah gagalnya fungsi pemerintahan yang berada pada angka 7,14 (Unit, 2020). Hal tersebut mengisyaratkan perlunya sebuah perbaikan yang lebih maksimal untuk mengetahui peran negara dalam melaksanakan tujuan pendiriannya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat (Haning, 2018).

Melalui disertasi yang ditulis oleh Philips Lorenz memaparkan bahwa perlunya penguatan *civil society* sebagai faktor pendorong demokrasi dengan tujuan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan. Dalam mendorong demokrasi menjadi lebih baik, Philip Lorenz menambahkan bahwa hadirnya *civil society* (masyarakat sipil) akan membantu untuk mempersiapkan medan politik dan kebijakan untuk reformasi selanjutnya (OECD, 2004). Senada dengan hal tersebut,

pemikiran Tocqueville tentang organisasi non pemerintah sangat mendukung dan dianggap penting karena organisasai tersebut adalah organisasi sukarela (*voluntary organization*) yang digagas oleh masyarakat atas dasar “saling mendukung” dan merupakan sumber demokrasi (Culla, 2006).

Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) sebagai *civil society* ikut ambil bagian dalam memberikan *insight* untuk perbaikan sistem kerangka kesejahteraan di daerah yang lebih baik ke depan dengan menyelenggarakan program sekolah demokrasi angkatan II yang bertujuan mempertemukan aktor-aktor demokrasi dari semua latarbelakang wilayah, daerah, dan gender untuk berdiskusi, berwacana, mencari solusi dan upaya bersama dalam perbaikan demokrasi. Dengan demikian, maka penulis akan melakukan kajian terkait **Peran Civil Society dalam Pendidikan Politik (Studi Peran Sekolah Demokrasi oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 telah diatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi warga negara Indonesia (Peraturan Pemerintah, 2012). Peraturan Pemerintah tersebut dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial” (Peraturan Pemerintah, Pasal 1). Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial salah satunya dilakukan melalui pemberdayaan sosial. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 pasal 15 huruf a menjelaskan bahwa “Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri” (Peraturan Pemerintah, Pasal 15 huruf a). Sehingga untuk mengupayakan hal tersebut diperlukan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh LP3ES melalui forum sekolah demokrasi angkatan II diantaranya membahas 13 (tiga belas) materi terkait dengan pembahasan kesejahteraan di daerah namun dalam mengkaji penelitian ini penulis hanya memilih 2 (dua) materi, diantaranya materi pertama adalah Urgensi Demokrasi dan *Good Governance* untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah serta materi yang kedua adalah Inisiatif-Inisiatif dan Pelajaran yang didapat (*lesson learned*) dari Praktik Terbaik (*best practices*) Reformasi Birokrasi. Dipilihnya materi tersebut berkorelasi dengan permasalahan penelitian dalam membahas kesejahteraan sosial khususnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial dalam memberikan upaya untuk perbaikan kesejahteraan di daerah melalui gagasan-gagasan yang disampaikan dalam pemaparan tersebut.

Materi Urgensi Demokrasi dan *Good Governance* untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dipaparkan oleh pemateri bapak Prof. Budi Setiyono yang menjelaskan bahwa negara dengan ideologi kapitalis maupun liberalis tetap memiliki fungsi pemerintahan dalam memastikan setiap warga negara memiliki standar kehidupan yang layak. Dalam konteks negara ekonomi ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah salah satunya adalah *provision for minimum access by individuals to the goods and services of the economy*. Dalam konteks ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warganya memiliki satu standar ekonomi tertentu. Jika ada rakyat yang masih tertinggal dalam artian belum mencapai suatu level standar tertentu bisa dikatakan pemerintah gagal menciptakan pemerintahan yang baik (*government failed*) dan gagal menjalankan demokrasi (*flawed democracy*).

Sedangkan materi mengenai Inisiatif-Inisiatif dan Pelajaran yang didapat (*lesson learned*) dari Praktik Terbaik (*best practices*) Reformasi Birokrasi yang dipaparkan oleh pemateri ibu Dr. Rina Martini menjelaskan bahwa inovasi program bagi sebuah pemerintah daerah merupakan satu keharusan guna mewujudkan sebuah tatanan masyarakat makmur, adil dan sejahtera. Fungsi utama pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan dengan melaksanakan pembangunan, pemberdayaan dan

pelayanan yang melibatkan birokrasi yang kompeten, akademisi, masyarakat sipil, media massa dan pengusaha.

Dari uraian diatas, penelitian ini penting untuk penulis kaji karena pendidikan politik merupakan pemahaman utama yang perlu di sosialisasikan oleh lembaga *civil society* kepada aktor-aktor demokrasi dalam rangka memperkuat demokrasi dan memberikan *insight* bagi perbaikan kerangka kesejahteraan di daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang telah di jelaskan diatas, penulis menguraikan 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Mengapa LP3ES melakukan pendidikan politik?
2. Bagaimana peran LP3ES dalam pendidikan politik?
3. Bagaimana tanggapan peserta sekolah demokrasi terhadap pelaksanaan pendidikan politik?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

1. Mengetahui landasan pelaksanaan pendidikan politik melalui program sekolah demokrasi LP3ES
2. Mengetahui peran LP3ES dalam pendidikan politik melalui program sekolah demokrasi
3. Mengetahui tanggapan peserta sekolah demokrasi terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh LP3ES

1.4.2 Tujuan Praktis

1. Sebagai syarat meraih gelar S.Sos pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia
2. Mendapatkan pengetahuan dengan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian atau kajian di bidang ilmu politik

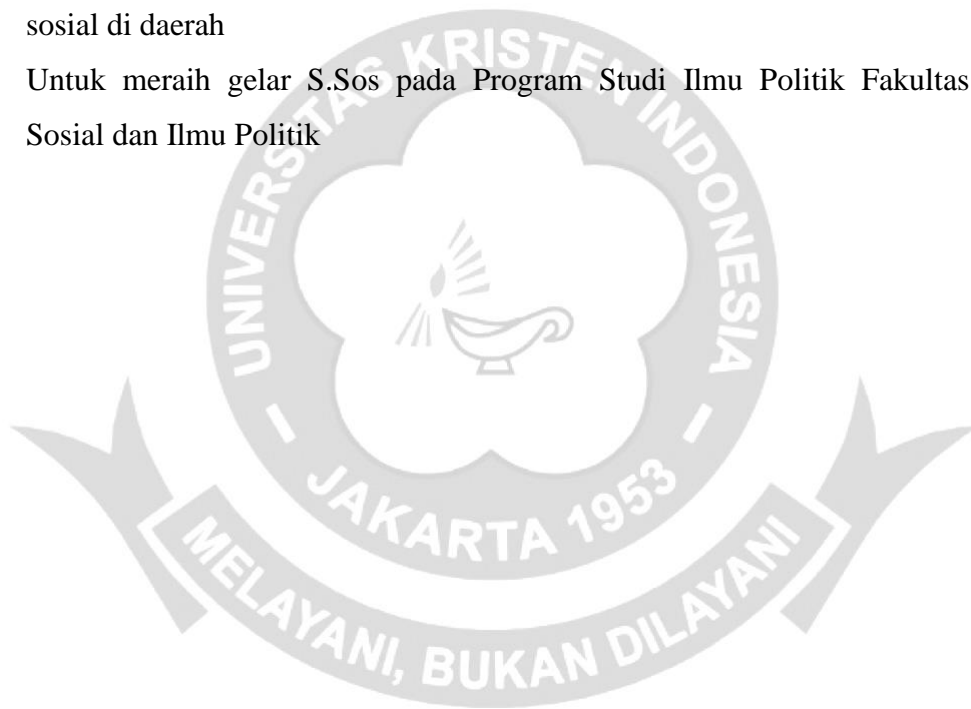
1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

1. Penelitian ini penting penulis lakukan untuk menjadi refleksi pemikiran ke depan dalam perbaikan kesejahteraan sosial di Indonesia

1.5.2 Signifikansi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai Peran *Civil Society* dalam Pendidikan Politik dan mengetahui pelaksanaan kesejahteraan sosial di daerah
2. Untuk meraih gelar S.Sos pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1.6 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Objek Penelitian
1.	Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014 (Syahputra, 2014)	Penelitian deskriptif kualitatif, jenis data primer (wawancara) dan jenis data sekunder (dokumentasi). Teknik analisis data model Alir (<i>flow model</i>) dan mendeskripsikan data dengan menyusun data sesuai dengan teori serta menarik kesimpulan berupa temuan baru	Teori <i>Civil Society</i> Alexis De Tocqueville	Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak memberikan ceramah yang berasal dari Al-Qur'an. Kontribusi politik Muhammadiyah sebagai <i>civil society</i> adalah mengarahkan masyarakat dan berperan aktif dalam memberi kritik dan masukan kepada negara. Melalui teori Alexis de Tocqueville, Muhammadiyah memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik.	LP3ES hadir sebagai lembaga yang melaksanakan pendidikan politik yang terfokus pada masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan menghadirkan pemateri yang menawarkan solusi dalam memperbaiki sistem kesejahteraan sosial masyarakat di daerah. Materi yang disampaikan oleh Prof. Budi Setiyono memberikan pemahaman kepada peserta tentang keterkaitan demokrasi dengan pembuatan desain kerangka kesejahteraan di daerah. Sedangkan pemaparan yang disampaikan oleh ibu Dr. Rina Martini memberikan edukasi kepada peserta untuk mengetahui inisiatif-inisiatif dan pengalaman pelaksanaan
2.	Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam Pendidikan Politik bagi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data	a. <i>Civic Education</i> b. <i>Civic Engagement</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Fatayat NU Sidoarjo dalam pendidikan politik dilakukan secara struktural dan kultural.	

	Perempuan (Sari, 2016)	dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan informan cabang Fatayat NU Sidoarjo dan data sekunder berupa dokumen dari kantor cabang Fatayat NU Sidoarjo		Tujuan pelaksanaan pendidikan ini adalah menumbuhkan pengetahuan dan partisipasi politik warga negara. Momen pemilu dimanfaatkan oleh Fatayat untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan bagi perempuan berupa penyadaran bagi masyarakat terkait hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat, dan memberangus <i>money politic</i> dan golput.	kebijakan reformasi birokrasi yang berhasil di daerah dimana inovasi program sebuah pemerintah daerah merupakan satu keharusan guna mewujudkan sebuah tatanan masyarakat makmur, adil dan sejahtera. Melalui teori Tocqueville, LP3ES berperan sebagai lembaga yang mengutamakan masalah kemasyarakatan melalui penyelenggaraan pendidikan politik. Teori tersebut didukung oleh teori lain diantaranya sosialisasi politik, demokrasi dan partisipasi politik serta kesejahteraan sosial. Pemikiran Tocqueville di tulis juga dalam disertasi yang di gagas oleh Philips Lorenz yang memaparkan bahwa perlunya penguatan <i>civil society</i> dalam mendorong demokrasi menjadi lebih baik.
3.	Peran Kelembagaan Lokal dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Studi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kota Makassar (Menge, 2013)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (data primer) dan dokumentasi (data sekunder)	a. Teori <i>Civil Society</i> Alexis De Tocqueville b. Teori Pembangunan Partisipatif	LPM kota Makassar berperan memfasilitasi proses perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang, menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan, membangun rasa gotong royong dan kemandirian masyarakat.	

1.7 Landasan Teoritik

1.7.1 *Civil Society* Alexis De Tocqueville

Pendidikan di Amerika mengesankan Tocqueville terlebih cara memobilisasi dan menyalurkan perasaan politik yang Ia anggap sangat penting (Mennel, John Stone dan Stephen, 2005). Tocqueville menjelaskan bahwa:

“Individu tidak akan berdaya menghadapi kekuatan komando pemerintahan terpusat kecuali bila ia bergabung dengan individu-individu lain untuk mewakili kepentingannya dan mewakili hak-haknya. Perkumpulan semacam ini akan menggantikan kekuatan pengimbang yang dilancarkan oleh kaum bangsawan”

Tocqueville memandang proses sosialisasi politik terorganisir mampu mengedukasi masyarakat aturan main demokrasi dan menjadi benteng yang kuat dalam memberangus kekuatan tirani baik diktrator “demokrasi” penghasut maupun oknum anarki penggerak massa. Tocqueville menjelaskan bahwa:

“Perkumpulan politik dan lembaga sekunder lainnya akan muncul dengan sendirinya hanya jika begitu banyak warga negara demokratis di didik untuk menggunakan dan memahami hak-hak politik mereka. Dengan berperan serta dalam lembaga-lembaga semacam itu, warga belajar aturan main demokrasi dan menjadi benteng terkuat untuk melawan diktrator demokratis”

Tocqueville menambahkan bahwa konflik sosial mudah diselesaikan jika adanya jejaring ikatan kelompok yang saling silang:

“Benturan kepentingan adalah hakikat politik, tetapi konflik sosial bisa di stabilkan dan diredakan oleh jejaring ikatan kelompok yang saling silang. Itulah pentingnya lembaga-lembaga masyarakat yang mengatur diri secara mandiri”

Beberapa tokoh merumuskan pemikiran Tocqueville tentang *civil society* diantaranya adalah:

1.7.1.1 Muhammad AS Hikam

Muhammad AS Hikam dalam bukunya *Demokrasi dan Civil Society* (Hikam, 1996) menjelaskan bahwa:

“Bagi Tocqueville, kekuatan politik dan *civil society*-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara. Untuk itu *civil society* mengisyaratkan pentingnya keberadaan wacana dan ruang publik yang bebas”

Dari penjelasan AS Hikam tersebut, ruang publik yang bebas menjadi penting sebagai tempat berkumpulnya elemen-elemen masyarakat dalam mengupayakan perbaikan kesejahteraan di daerah.

1.7.1.2 Juergen Habermas

Pemikiran tersebut senada dengan Juergen Habermas (Habermas, 1981) yang menjelaskan bahwa:

“Melalui ruang publik tersebut, *civil society* melakukan aksi politik yang sebenarnya dan bermakna bisa benar-benar terwujud”

Syarat penting bagi keberadaan *civil society* adalah adanya ruang publik yang bebas. Habermas dalam bukunya yang berjudul *The Public Sphere* (Habermas, 1974) menjelaskan bahwa:

“Ruang publik bebas adalah ruang bagi individu-individu dengan posisi yang setara dapat melakukan wacana tanpa adanya kekhawatiran, berhak melakukan kegiatan secara independentermasuk dalam menyampaikan pendapat baik di media massa, tempat-tempat pertemuan umum, parlemen dan sekolah-sekolah”

1.7.1.3 Manfred Henningsen

Berdasarkan penjelasan diatas, Manfred Henningsen dalam bukunya *Democracy or the Promise of Civil Society* menjelaskan defenisi dari *civil society* (Henningsen, 1990):

“*Civil Society* secara institusional diartikan sebagai gabungan kelompok masyarakat sebagai warga negara yang mandiri dengan mengutamakan masalah kemasyarakatan melalui partisipasinya dalam wacana publik yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif”

Dengan demikian, teori dari pemikiran Alexis De Tocqueville, Hubermas dan Manfred Henningsen sangat relevan dalam mengkaji penelitian ini. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis peran LP3ES sebagai lembaga *civil society* yang hadir

untuk memberikan investarisasi sumber daya manusia melalui pendidikan politik dengan membuka forum dialog dalam mempertemukan elemen-elemen masyarakat yang paham tentang demokrasi.

1.7.2 Sosialisasi Politik

1.7.2.1 Sosialisasi Politik menurut M. Rush dan Miriam Budiardjo

Sosialisasi politik menurut M. Rush merupakan alur yang dilalui oleh individu dalam kelompok masyarakat tertentu untuk belajar mengetahui sistem politiknya dan alur yang dilaluinya tersebut akan menentukan pemikiran dan aksi mereka terhadap gejala atau fenomena politik (Rush, 1992). M. Rush menjelaskan bahwa:

“Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik”

Menurut Miriam Budiardjo, sosialisasi politik mampu menafsirkan perilaku politik individu, baik dalam hal ideologi, hak dan kewajiban, nasionalisme, suku bangsa, dan kelas sosial (Budiardjo, 2017). Dari kedua teori yang disampaikan oleh M. Rush dan Miriam Budiardjo relevan untuk digunakan dalam mengetahui pemikiran dan aksi peserta sekolah demokrasi dalam pelaksanaan pendidikan politik sebagai kontribusinya mewarnai proses demokrasi di Indonesia.

1.7.3 Pemberdayaan Sosial

1.7.3.1 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 15 huruf a menjelaskan bahwa:

“Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”

1.7.3.2 Pemberdayaan menurut Ambar Teguh

Menurut Ambar Teguh, pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses memberdayakan potensi yang ada (Sulistiyani, 2004). Ambar menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“Pemberdayaan adalah transisi menuju berhasil guna atau kelangsungan pemberian potensi atau kesanggupan maupun kapasitas dari orang yang berpotensi kepada orang atau individu yang tidak atau kurang berpotensi. Pemberdayaan terdiri dari tiga hal diantaranya adalah pengembangan (*enabling*), usaha mempekokoh kemampuan dan kapasitas (*empowering*) dan terwujudnya independensi atau kemandirian”

Kedua penjelasan tersebut relevan untuk menjelaskan pemberdayaan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial untuk kemudian diberdayakan oleh pemerintah daerah agar bisa hidup secara layak dan mampu mewujudkan kemandirian.

1.7.4 Demokrasi dan Partisipasi Politik

Dalam buku Miriam Budiardjo tentang Dasar-Dasar Ilmu politik menjelaskan bahwa demokrasi konstitusional abad-20 mencirikan negara dimana pemerintah bertanggungjawab atas kemakmuran warga negara dan terlibat aktif dalam menata kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Demokrasi di negara kesejahteraan (*welfare state*) hadir sebagai negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini *Commision of Jurists* (demokrasi berdasarkan perwakilan) mengutamakan terjaminnya hak golongan minoritas atas mayoritas yang dinamakan dengan demokrasi hak asasi yang terlindungi dengan menjamin hak-hak golongan minoritas (Budiardjo, 2017).

Sedangkan partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo di kelompokkan dalam dua bentuk wujud pelaksanaannya yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional. Partisipasi konvensional mencakup aktivitas diantaranya prihatin terhadap isu-isu politik, terlibat dalam diskusi politik, memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin dan melakukan aktivitas dalam pemilihan umum. Sedangkan partisipasi non konvensional diantaranya berupa mengajukan sebuah petisi,

demonstrasi, boikot, vandalisme dalam rangka memperbaiki keadaan politik (Agustino, 2020). Miriam Budiardjo menjelaskan poin penting sebagai berikut:

“Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*)”

1.7.5 Kesejahteraan Sosial

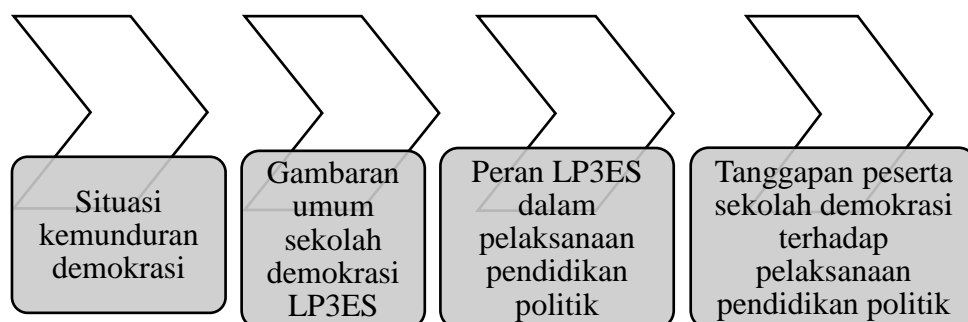
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa (Peraturan Pemerintah, Pasal 1 Ayat 1 dan 2):

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Teori diatas akan digunakan untuk menganalisis program pemberdayaan masyarakat di daerah yang dikaitkan dengan demokrasi, partisipasi politik dan kesejahteraan sosial sebagai wujud implementasi berhasil atau tidaknya pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

1.8 Alur Berpikir

Gambar 1.8 Alur Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya oleh Dr. J.R. Raco menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang mencari arti dan mengerti sebuah gejala, peristiwa dan realita yang terjadi dengan memahami arti yang terdalam (*indepth*) atas gejala maupun peristiwa dan realita itu terjadi (Raco, 2010).

1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan. Dalam penelitian tindakan, penulis akan mengidentifikasi sesuatu yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan cara yang berbeda untuk melakukan sesuatu atas refleksi terhadap apa yang telah terjadi. Kemudian atas refleksi tersebut penulis mampu merumuskan langkah atau tindakan berikutnya yang di nilai lebih tepat dalam mengatasi masalah yang muncul atas refleksi tersebut agar masalah tersebut tidak muncul kembali (Martono, 2016).

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

1.9.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses berinteraksi dan berkomunikasi dengan informan dan hasil wawancara ditentukan oleh faktor yang melakukan interaksi dan memengaruhi arus informasi (Effendi, 2012). Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam atau *Indepth Interview* yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dalam hal ini pelaksanaannya lebih bebas bila di dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang di wawancarai akan menyampaikan pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara penulis harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang

disampaikan oleh informan (Winarnu, 2018). Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan aplikasi *zoom* sekaligus untuk merekam hasil wawancara, buku catatan untuk mencatat poin penting dan *handphone* untuk merekam hasil wawancara jika wawancara dilakukan melalui via *WhatsApp* atau *Google Meet* yang kemudian di transkrip sebagai data primer dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini menggunakan prosedur *purposive sampling* dengan memilih informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Silalahi, 2010). Dalam hal ini penulis melakukan kajian dan analisis dari pemaparan Prof. Budi Setiyono dan Dr. Rina Martini serta melakukan wawancara dengan 3 (tiga) informan dari internal LP3ES dan 7 (tujuh) informan dari peserta sekolah demokrasi LP3ES angkatan II yang mampu memberikan data yang signifikan dalam penulisan penelitian ini.

1.9.3.2 Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Menurut Nasution dalam buku Endang Widi Winarnu tahun 2018 bahwa ilmu pengetahuan hanya di dapatkan dari data yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh dari hasil observasi. Menurut Spradley dalam Susan Stainback observasi partisipatif di golongan beberapa bidang salah satunya adalah partisipasi pasif (*passive participation*) yang relevan dengan observasi dalam penelitian ini. Partisipasi pasif merupakan observasi dimana penulis datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Winarnu, 2018). Dalam penelitian ini, penulis tidak terlibat sebagai peserta sekolah demokrasi LP3ES angkatan II namun penulis mengamati proses pembelajaran melalui kanal youtube LP3ES dan menganalisis pemaparan yang disampaikan oleh pemateri untuk mendukung data penelitian serta mengunjungi kantor LP3ES untuk mencari data-data penelitian yang terkait.

1.9.3.3 Sumber data

1. Data Primer dan Data Sekunder

Pengumpulan data primer dihasilkan dari wawancara guna untuk menggali informasi yang lebih mendalam melalui teknis *purposive sampling*. Artinya bahwa

prosedur yang dilakukan dengan memilih informan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka (studi literatur) yang merupakan data terkait yang bersumber dari buku, jurnal, laporan, artikel, makalah, prosiding, disertasi, serta analisis konten media seperti media cetak maupun elektronik seperti internet.

2. Triangulasi data

Triangulasi adalah teknik mengumpulkan, memeriksa serta menganalisa data dari perspektif yang berbeda diantaranya dari hasil pengamatan dan hasil wawancara yang disebut sebagai triangulasi metode (Suwartono, 2012). Dalam penelitian ini penulis melakukan *cross check* data melalui peserta yang terlibat di dalam pendidikan politik dan dapat menilai serta mengkritisi proses pembelajaran yang sudah dilangsungkan sehingga menciptakan rasa keterbukaan dan kejujuran dari penulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang berbentuk gambar atau karya-karya bersejarah yang berasal dari subjek penelitian, baik melalui pengamatan, maupun aktivitas yang berkaitan dengan tema penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berasal dari internet berupa media sosial, informan maupun dari sumber lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini akan menjadi data penunjang dalam menjelaskan terkait tema penelitian sehingga lebih valid dan terpercaya.

1.9.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengetahui kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2012). Pedoman wawancara dalam penelitian ini sebagai alat memori yang berisi beberapa topik pertanyaan dalam bentuk wawancara mendalam. Instrumen penelitian atau pedoman wawancara dalam penelitian ini akan di jelaskan secara detail dalam tabel 1.9.4.

Tabel 1.9.4 Instrumen Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	Narasumber
<i>Civil Society</i>	Lembaga masyarakat yang mengatur diri secara mandiri	Konflik sosial bisa— di stabilkan dan diredakan oleh jejaring ikatan kelompok yang saling silang	1. Apa tujuan menggagas program sekolah demokrasi LP3ES? 2. Apa landasan mengangkat tema demokrasi, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan daerah?	Prof. Didik J. Rachbini
	Ruang publik yang bebas	<i>Civil Society</i> melakukan aksi politik yang sebenarnya dan bermakna bisa benar-benar terwujud	1. Bagaimana sistem pelaksanaan pendidikan politik? 2. Apa peran sekolah demokrasi LP3ES dalam pendidikan politik?	Pak Fajar Nursahid dan Pak Wijayanto
			1. Apa gagasan yang diberikan dalam perbaikan kesejahteraan di daerah?	Prof. Budi Setiyono dan Ibu Dr. Rina Martini
Sosialisasi Politik	Proses yang melalui individu dalam masyarakat tertentu untuk belajar mengenali sistem politiknya	Menafsirkan perilaku politik individu, baik dalam hal ideologi, hak dan kewajiban, nasionalisme, suku bangsa, dan kelas sosial	1. Bagaimana implikasi dan manfaat dari pelaksanaan pendidikan politik terhadap peserta sekolah demokrasi LP3ES? 2. Apakah materi yang disampaikan sudah di implementasikan? 3. Apa hambatan dalam pengimplementasian materi yang di sampaikan?	Informan peserta sekolah demokrasi LP3ES angkatan II
Pemberdayaan Masyarakat	Upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga	Mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan pemberian potensi dan kapasitas	4. Apakah pemerintah sudah melaksanakan <i>provision for minimum acces by individuals to the goods and</i>	

	negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya		<i>services of the economy</i> (Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warganya memiliki satu standar ekonomi tertentu)	
Demokrasi	Demokrasi Konstitusional abad-20 dan <i>Commision of Jurists</i> (demokrasi berdasarkan perwakilan)	Pemerintah bertanggung jawab atas kemakmuran warga negara dan terjaminnya hak-hak golongan minoritas atas mayoritas	<p>5. Apakah <i>social safety net</i> dalam mencegah rakyat terjerembab dalam kemiskinan sudah dilaksanakan?</p> <p>6. Apakah <i>man power planning</i> (dalam hal ini rakyat dipastikan memiliki hak untuk hidup secara layak yang dapat ditinjau pemerintah maupun perusahaan industri melalui sebuah database) sudah dilaksanakan?</p> <p>7. Apakah <i>full employment</i> (memprediksi di daerah tidak ada pengangguran) sudah dilaksanakan?</p> <p>8. Apakah sudah ada penyempurnaan jaminan sosial?</p>	Informan peserta sekolah demokrasi LP3ES angkatan II
Partisipasi Politik	Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik	Terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan	9. Apa peran masyarakat dalam mendorong kesejahteraan di daerah saat ini?	
Kesejahteraan Sosial	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak	Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berperan guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara	<p>10. Apa kontribusi pemerintah bagi kesejahteraan di daerah?</p> <p>11. Apakah pemerintah melakukan komunikasi antar <i>top level</i> birokrasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial saat ini?</p>	

1.9.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu model Miles dan Huberman yakni melalui *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing* (Huberman, 1994). Reduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah data-data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data yakni langkah penyajian data dalam bentuk tabel, kalimat-kalimat, dan gambar. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi sehingga data terorganisasi dan tersusun baik. Verifikasi data yakni data yang telah terkumpul, di uji secara empiris sehingga validitas, realibilitas dan obyektivitas data teruji secara valid.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teoritik, Alur Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: Gambaran Umum Sekolah Demokrasi LP3ES

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum sekolah demokrasi LP3ES yang menjelaskan terkait sejarah lahirnya LP3ES, program pendidikan LP3ES, struktur umum organisasi yaitu susunan kepengurusan LP3ES, terbentuknya Pusat Studi Media dan Demokrasi yang melahirkan program Sekolah Demokrasi LP3ES dan penjelasan sasaran dan informan Penelitian

BAB III: Peran LP3ES dalam Pendidikan Politik

Bab ini menjelaskan temuan dan interpretasi data dalam penyelenggaraan pendidikan politik dari pihak-pihak internal LP3ES dan paparan materi dari Prof. Budi Setiyono dan Ibu Dr. Rina Martini dengan menggunakan teori *civil society* Alexis De Tocqueville dan teori pendukung diantaranya teori ruang publik dari Juergen Habermas dan defenisi *civil society* dari Manfred Henningsen

BAB IV: Tanggapan Peserta Sekolah Demokrasi terhadap Pelaksanaan Pendidikan Politik

Bab ini menjelaskan tanggapan peserta sekolah demokrasi terhadap pelaksanaan pendidikan politik serta menjelaskan implementasi program pemberdayaan di daerah beserta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan program pemberdayaan yang dikaitkan dengan demokrasi, partisipasi politik dan kesejahteraan sosial

BAB V: Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang di peroleh dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penemuan penelitian serta dapat menjawab pertanyaan penelitian dan berisikan saran-saran yang berguna dalam mendukung penyusunan hasil penelitian

